

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran

2019

[Audited]

Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Konser Bundengan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD adalah salah satu entitas Pelaporan dibawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wonosobo, 26 Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Wonosobo
Kepala Satpol. PP. Kab. Wonosobo



Haryono, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

1.1.2. Tujuan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntabilitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- i. Laporan Realisasi Anggaran
- ii. Neraca
- iii. Laporan Operasional
- iv. Laporan Perubahan Ekuitas

1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keugian Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo ;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ;
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ;

27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 disusun agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.1. Pendapatan LRA
- 3.1.2. Belanja LRA

3.2. Neraca

- 3.2.1. Aset
- 3.2.2. Kewajiban
- 3.2.3. Ekuitas

3.3. Laporan Operasional

- 3.3.1. Pendapatan LO
- 3.3.2. Beban LO
- 3.3.3. Surplus / Defisit

3.4. Laporan Perubahan ekuitas

Bab. IV Penutup

BAB II
IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2019

Selama periode berjalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	4.683.496.097,00	6.232.058.197,00	133,06
Pendapatan Asli Daerah	4.683.496.097,00	6.232.058.197,00	133,06
Pendapatan Retribusi Daerah	4.673.000.000,00	6.221.561.300,00	133,14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.496.097,00	10.496.897,00	100,01
BELANJA	27.808.935.669,00	26.344.048.071,00	94,73
Belanja Operasi	14.411.056.469,00	13.682.685.338,00	94,95
Belanja Modal	13.397.879.200,00	12.661.362.733,00	94,50
SURPLUS/(DEFISIT)	(23.125.439.572,00)	(20.111.989.874,00)	86,97
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(23.125.439.572,00)	(20.111.989.874,00)	86,97

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2019 dapat terealisasi sebesar Rp. 6.232.058.197,00 atau 133,06 % dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.683.496.097,00 sudah melebihi target anggaran sebesar Rp. 1.548.562.100,00.
2. Belanja Tahun Anggaran 2019 dapat terealisasi sebesar Rp. 26.344.048.071,00 atau 94,73 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27.808.935.669,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 1.464.887.598,00.
3. Surplus anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp. 20.111.989.874,00).
4. SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 mencapai (Rp. 20.111.989.874,00) turun sebesar Rp. 3.014.416.795,00 dari anggaran sebesar (Rp. 23.125.439.572,00).

2.2 Realisasi TA 2019 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2018

URAIAN	Realisasi TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik/(Turun)	%
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	6.232.058.197,00	4.994.074.600,00	1.237.983.597,00	24,79
Belanja	26.344.048.071,00	25.515.033.006,00	829.015.065,00	3,25
Surplus/(Defisit)	(20.111.989.874,00)	(20.520.958.406,00)	408.968.532,00	(1,99)
Pembiayaan	-	-	-	
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
Pembiayaan Netto	-	-	-	
SILPA	(20.111.989.874,00)	(20.520.958.406,00)	408.968.532,00	(1,99)

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- 2.2.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.232.058.197,00 sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.994.074.600,00. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan realisasi pendapatan TA. 2019 sebesar Rp. 1.237.983.597,00 atau 24,79 % dibandingkan TA. 2018.
- 2.2.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan dari Rp. 26.344.048.071,00 pada Tahun 2018 menjadi Rp. 25.515.033.006,00 atau mengalami kenaikan 3,25 %.
- 2.2.3 SILPA Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 1,99 % dibandingkan SILPA Tahun 2018.

2.3 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi

- 2.3.1 Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Secara umum kondisi Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya, ketertiban, dan keamanan, sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit pengelola pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah :

- 2.3.1.1 Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan retribusi;
 - 2.3.1.2 Peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta mendukung Sapta Pesona di daerah masih rendah;
 - 2.3.1.3 Belum ada pembaharuan beberapa peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, desa wisata, dan usaha pariwisata; dan
 - 2.3.1.4 Kesadaran legalitas usaha pariwisata masih perlu ditingkatkan.
- 2.3.2 Hambatan dalam pencapaian target Belanja
- Hambatan dalam pencapaian target Belanja antara lain :
- 2.3.2.1 Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang manajemen pariwisata, bahasa asing, perhotelan, teknik arsitektur, dan akuntansi, serta bidang lainnya;
 - 2.3.2.2 Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang keluarannya diperubahan anggaran;
 - 2.3.2.3 Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik; dan
 - 2.3.2.4 Sistem Pengawasan dari BPK, BPKP, dll. dianggap sebagai penyebab terhambatnya proses tender pengadaan, misalnya pejabat ada yang enggan ditunjuk menjadi pemimpin proyek atau panitia pengadaan karena takut akan resiko dan ketidakpastian regulasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, berupa :

3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

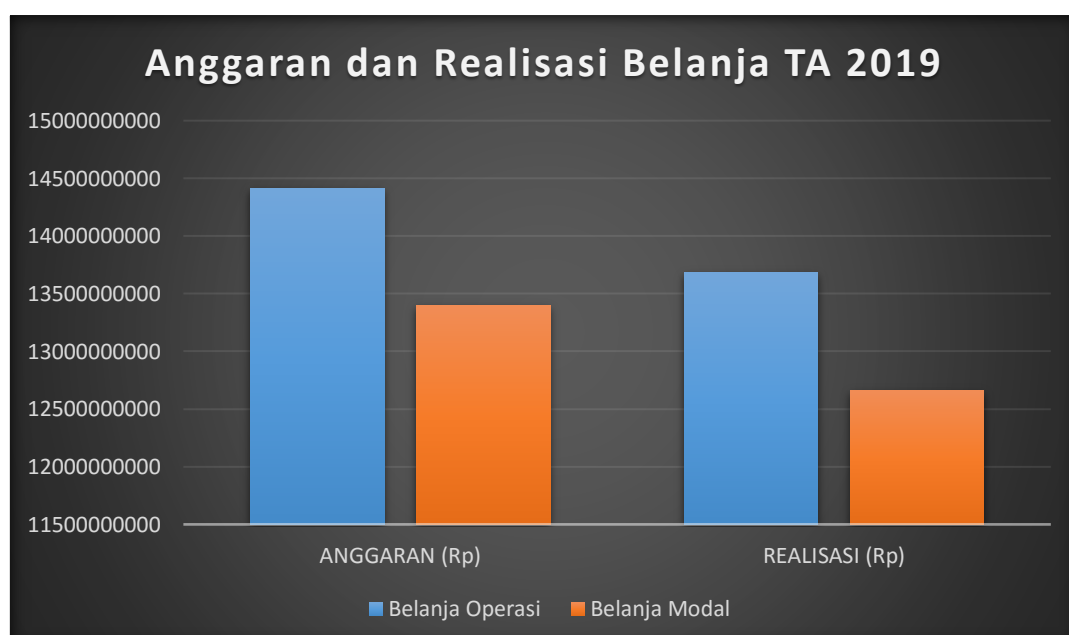
Realisasi retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.221.561.300,00. Adapun retribusi Daerah hanya berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

3.1.1.2. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.494.897,00 berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang sah.

3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA. 2019 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :



Secara garis besar, anggaran dan realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2019 serta realisasi TA. 2018 disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Belanja Operasi	14.411.056.469,00	13.682.685.338,00	9.820.825.430,00	94,95
Belanja Modal	13.397.879.200,00	12.661.362.733,00	15.694.207.576,00	94,50
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-
Jumlah	27.808.935.669,00	26.344.048.071,00	25.515.033.006,00	94,73

Realisasi Belanja TA. 2019 sebesar Rp. 26.344.048.071,00 dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27.808.935.669,00. Bila dibandingkan dengan TA. 2018, realisasi belanja TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 829.015.065,00 atau sebesar 94,73 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Realisasi belanja operasi Tahun 2019 sebesar 94,95 % dibandingkan anggaran. Realisasi belanja tersebut lebih besar dari realisasi Tahun 2018, dengan peningkatan sebesar Rp. 3.861.859.908,00.
2. Realisasi belanja modal Tahun 2019 sebesar 94,50 % dibandingkan anggaran. Realisasi belanja modal tersebut lebih kecil dari realisasi Tahun 2018, dengan penurunan sebesar Rp. 3.032.844.843,00.

Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2019 :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi TA. 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.682.685.338,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 14.411.056.469,00. Anggaran dan realisasi belanja operasi TA. 2019 serta TA. 2018 sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	ANGGARAN TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.628.415.364,00	4.272.234.810,00	4.064.787.469,00	92,30
Belanja Barang	7.350.291.105,00	7.074.152.500,00	4.692.102.961,00	96,24
Belanja Hibah	2.139.350.000,00	2.043.298.028,00	954.935.000,00	95,51
Belanja Bantuan Sosial	293.000.000,00	293.000.000,00	109.000.000,00	100,00
Jumlah	14.411.056.469,00	13.682.685.338,00	9.820.825.430,00	94,95

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.861.859.908,00 atau 39,32 %. Realisasi Tahun 2019 sebesar 94,95 % dibandingkan anggaran Tahun 2019.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun Anggaran 2019 dapat terealisasi sebesar Rp. 12.661.362.733,00 atau mencapai 94,97 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 13.397.879.200,00.

BELANJA MODAL	ANGGARAN TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)
Belanja Tanah	-	-	2.892.437.048,00
Belanja Peralatan dan Mesin	106.850.000,00	102.616.700,00	434.504.500,00
Belanja Bangunan dan Gedung	13.141.029.200,00	12.411.047.033,00	12.367.266.028,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	150.000.000,00	147.699.000,00	-
Jumlah	13.397.879.200,00	12.661.362.733,00	15.694.207.576,00

Penjelasan :

3.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 tidak ada karena tidak terdapat anggaran belanja modal untuk tanah. Tahun Anggaran 2018 yang ada realisasi anggaran sebesar Rp. 2.892.437.048,00.

3.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 102.616.700,00 dengan anggaran sebesar Rp. 106.850.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 maka realisasi anggaran Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 331.887.800,00 dari realisasi sebesar Rp. 434.504.500,00.. Adapun belanja peralatan dan mesin berupa belanja alat *e-ticketing* Kawasan Taman Syailendra, belanja hibah alat kesenian, dan belanja bantuan alat *drum band*.

3.1.2.2.3. Belanja Bangunan dan Gedung

Realisasi belanja bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 12.411.047.033,00 atau mencapai 94,45 % dari anggaran sebesar Rp. 13.141.029.200,00. Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.367.266.028,00.

Belanja bangunan dan Gedung tersebut berupa pembangunan Rehabilitasi fasilitas dan amenita dan kios Situs Bimolukar, penataan sarana prasarana dan perbaikan amenitas pariwisata di Taman Rekreasi Kalianget, revitalisasi obyek wisata mangli, pembangunan Gedung/*guest house* di TIC Dieng, Pengadaan *gazebo*/pergola di Kawasan Obyek Wisata, pembangunan senderan dan rehabilitasi Pos Kawasan Gardu Pandang Desa Tieng, dan rehabilitasi *shalter* DPT/penataan kios dan kawasan DPT.

3.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 147.699.000,00 atau mencapai 98,47 % dari anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00. Adapun belanja tersebut berupa pengaspalan kawasan pos penarikan tol Garung.

3.2. Neraca

Neraca Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019 menunjukkan posisi Aset sebesar Rp. 52.191.835.998,04. Kewajiban sebesar Rp. 11.207.448,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 52.180.628.550,04 sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Aset	52.191.835.998,04	40.399.148.425,50	29,19
Kewajiban	11.207.448,00	9.224.790,00	21,49
Ekuitas	52.180.628.550,04	40.389.923.635,50	29,19
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	52.191.835.998,04	40.339.148.425,00	29,38

3.2.1. Aset

Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 52.191.835.998,04 dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut :

3.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 69.870.116,04 terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Penerima	Rp.	941.100,00
2. Piutang Pendapatan	Rp.	95.816.500,00
3. Penyisihan Piutang	(Rp.	52.916.250,00)
4. Persediaan	Rp.	26.028.766,04
Jumlah	Rp.	69.870.116,04

Aset lancar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya terdiri dari kas di bendahara penerima, piutang pendapatan, dan persediaan, sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran, setara kas, investasi jangka pendek, piutang lainnya, penyisihan piutang, dan beban dibayar dimuka tidak ada asset lancar-nya. Berikut penjelasan dari 3 rincian tersebut diatas :

1. Kas di Bendahara Penerima

Saldo Kas di Bendahara Penerima per Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp. 941.100,00 dan Rp.951.700,00. Kas tersebut meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerima yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah.

2. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 95.816.500,00 dan Rp. 15.360.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 523,81 %. Piutang pendapatan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

3. Penyisihan Piutang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai penyisihan piutang pada Tahun 2019 sebesar (Rp. 52.916.250,00).

4. Persediaan

Nilai persediaan per Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 26.028.766,04 dan Rp. 18.325.683,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per Tanggal 31 Desember 2019 adalah persediaan bahan pakai habis Rp. 26.028.766,04 yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 283.956,00, persediaan sebesar Rp. 24.000,00, perangko, materai, benda pos dan cetak sebesar Rp. 25.720.816,04.

3.2.1.2. Aset Tetap

Asset Tetap per 31 Desember 2019 senilai Rp. 52.107.735.706,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp. 40.335.675.362,00 mengalami kenaikan sebesar 29,18 % dari Tahun 2018. Adapun rincian aset tetap selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Tanah	12.290.648.383,00	12.290.648.383,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.946.703.415,00	1.865.112.315,00	4,37
Gedung dan Bangunan	38.474.001.236,00	25.964.686.153,00	48,18
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	2.752.875.191,00	2.752.875.191,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	645.667.938,00	596.236.988,00	8,29
Konstruksi dalam Pengerjaan	500.484.771,00	500.484.771,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.502.645.228,00)	(3.634.368.439,00)	23,92
Jumlah	52.107.735.706,00	40.335.675.362,00	29,18

Adapun penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

3.2.1.2.1. Tanah

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)		Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Tanah untuk Bangunan Gedung	11.385.722.913,00	-	-	-	-	11.385.722.913,00
Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	904.925.470,00	-	-	-	-	904.925.470,00
Jumlah	12.290.648.383,00	-	-	-	-	12.290.648.383,00

Tidak terdapat mutasi debit maupun kredit dan tidak ada koreksi pada Tahun 2019. Pada Tahun Anggaran 2019 tidak ada pengurangan aset baik mutasi atau koreksi kredit.

3.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 1.865.112.315,00 dan Rp. 1.865.112.315,00. Aset tersebut tidak mengalami perubahan dari Tahun 2018.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019
		D	K	D	K	
Alat-alat Bantu	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	565.636.804,00	-	21.025.600,00	-	-	544.611.204,00
Alat Angkut Udara	-	-	-	-	-	-
Alat Ukur	12.283.700,00	-	-	-	-	12.283.700,00
Alat Kantor	393.686.940,00	38.710.000,00	-	7.900.300,00	-	440.297.240,00
Alat Rumah Tangga	379.235.992,00	30.252.000,00	-	8.415.000,00	-	417.902.292,00
Komputer	284.315.672,00	2.734.200,00	2.734.200,00	9.584.400,00	-	293.900.072,00
Meja dan Kursi Rapat/Kerja Pejabat	52.313.750,00	-	32.722.000,00	40.477.000,00	-	60.068.750,00
Alat Studio	136.037.828,00	-	-	-	-	136.037.828,00
Alat Komunikasi	6.334.000,00	-	-	-	-	6.334.000,00
Alat Keamanan & Perlindungan	30.267.629,00	-	36.240.000,00	36.240.000,00	-	30.267.629,00
Jumlah	1.865.112.315,00	71.696.200,00	92.721.800,00	102.616.700,00	-	1.946.703.415,00

Penjelasan Mutasi :

1. Alat-Alat Bantu

Nilai aset tetap berupa alat-alat bantu per Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 sama dengan kondisi akhir Tahun 2018.

2. Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 544.611.204,00 dan Rp. 565.636.804,00. Ada koreksi mutasi kredit sebesar Rp. 21.025.600,00.

3. Alat Angkut Udara

Nilai aset tetap berupa alat angkut udara pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak terdapat aset berupa alat angkut udara.

4. Alat Ukur

Nilai aset tetap berupa alat ukur per 31 Desember 2019 dan 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan yaitu sebesar Rp. 12.283.700,00. Adapun alat ukur dimaksud berupa Jangka Sorong (Rp. 1.600.000,00), GPS (Rp. 3.099.800,00), Digital Meter (Rp. 3.000.800,00), dan Alat Timbang Digital (Rp. 4.582.600,00).

5. Alat Kantor

Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu sebesar Rp. 440.297.240,00 dan Rp. 393.686.940,00. Mengalami koreksi debit sebesar Rp. 38.710.000,00 dan mutasi debit Rp. 7.900.300,00.

6. Alat-Alat Rumah Tangga

Nilai aset tetap berupa alat-alat rumah tangga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 417.902.292,00 sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp. 379.235.992,00. Adanya penambahan asset tersebut karena terjadi koreksi debit sebesar Rp. 30.252.000,00 dan mutasi debit Rp. 8.415.000,00.

7. Komputer

Nilai aset berupa alat komputer per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 293.900.072,00 sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp. 284.315.672,00. Pada tahun 2019 terdapat koreksi debit sebesar Rp. 2.734.200,00 dan koreksi kredit Rp. 2.734.200,00 serta mutasi debit Rp. 9.584.400,00.

8. Meja dan Kursi Rapat Pejabat

Nilai aset tetap berupa meja dan kursi/rapat pejabat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 60.068.750,00 dan Tahun 2018 Rp. 52.313.750,00. Mengalami koreksi kredit sebesar Rp. 32.722.000,00 dan mutasi debit Rp. 40.477.000,00.

9. Alat Studio

Nilai aset tetap berupa alat studio per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 136.037.828,00. Tidak mengalami/terjadi mutasi maupun koreksi.

10. Alat Komunikasi

Nilai aset tetap berupa alat komunikasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.334.000,00. Tidak mengalami mutasi dari awal Tahun 2019.

11. Alat Keamanan dan Perlindungan

Nilai aset tetap berupa alat keamanan dan perlindungan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 30.267.629,00 dan pada Tahun 2018 aset tersebut nilainya sama, terjadi mutasi debet sebesar Rp. 36.240.000,00 dari belanja modal berupa alat bantu keamanan Tahun Anggaran 2019 dan mutase IT Rp. 36.240.000,00 berupa alat bantu lainnya.

3.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 38.474.001.236,00 dan Rp. 25.964.686.153,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.411.047.033,00 dari Tahun 2018. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)		Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.700.304.307,00	4.515.167.425,00	4.416.899.375,00	12.411.047.033,00	-	38.209.619.390,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.731.470,00	-	-	-	-	149.731.470,00
Tugu Peringatan	114.650.376,00	-	-	-	-	114.650.376,00
Jumlah	25.964.686.153,00	4.505.167.425,00	4.416.899.375,00	12.411.047.033,00	-	38.474.001.236,00

Penjelasan Mutasi :

1. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Nilai aset tetap berupa bangunan gedung tempat kerja per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 38.20.619.390,00 dan Rp. 25.700.304.307,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.509.315.083,00 atau sebesar 48,18 % dari Tahun 2018. Mutasi debet sebesar Rp. 12.411.047.033,00 adalah hasil pengadaan barang Tahun 2019 dari belanja modal dan bangunan berupa Gedung tempat pertemuan. Realisasi Anggaran Tahun 2019 terjadi koreksi debet sebesar Rp. 4.505.167.425,00 dan kredit Rp. 4.416.899.375,00, serta mutasi debet sebesar Rp. 12.411.047.033,00.

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Nilai aset tetap berupa bangunan Gedung tempat tinggal per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 149.731.470,00, tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

3. Tugu Peringatan

Nilai aset tetap berupa Tugu Peringatan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 114.650.376,00 dan Rp. 114.650.376,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

3.2.1.2.4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Nilai jalan, jaringan, dan instalasi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 2.752.875.191,00 dan Rp. 2.752.875.191,00, mengalami penambahan dari Tahun 2018. Mutasi transaksi terhadap jalan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Jalan	1.536.268.060,00	-	147.699.000,00	147.699.000,00	-	1.536.268.060,00
Bangunan Air Irigasi	122.332.953,00	-	-	-	-	122.332.953,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	93.750.000,00	-	-	-	-	93.750.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	467.853.678,00	-	-	-	-	467.853.678,00
Instalasi Air Minum/Air Bersih	487.990.500,00	-	-	-	-	487.990.500,00
Jaringan Listrik	44.680.000,00	-	-	-	-	44.680.000,00
Jumlah	2.752.875.191,00	-	147.699.000,00	147.699.000,00	-	2.752.875.191,00

Penjelasan mutasi :

1. Jalan

Nilai aset tetap berupa jalan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 1.536.268.060,00 dan Rp. 1.536.268.060,00. Mengalami koreksi kredit sebesar Rp. 147.699.000,00 dan mutasi debet sebesar Rp. 147.699.000,00.

2. Bangunan Air irigasi

Nilai aset tetap berupa bangunan air irigasi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 122.332.953,00 dan Rp. 122.332.953,00 tidak

mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

3. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Nilai aset tetap berupa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 93.750.000,00 dan Rp. 93.750.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

4. Bangunan Air Bersih/Baku

Nilai aset tetap berupa bangunan air bersih/baku per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 467.853.678,00 dan Rp. 467.853.678,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

5. Instalasi Air Minum/Air Bersih

Nilai aset tetap berupa instalasi air minum/air bersih per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 487.990.500,00 dan Rp. 487.990.500,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

6. Jaringan Listrik

Nilai aset tetap berupa jaringan listrik per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 44.680.000,00 dan Rp. 44.680.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

3.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 596.236.988,00 dan Rp. 596.236.988,00, tidak mengalami penambahan/pengurangan dari Tahun 2018. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Buku	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00
Barang-Barang Perpustakaan	228.136.000,00	-	-	-	-	228.136.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan	177.120.988,00	-	-	-	-	177.120.988,00
Alat Olahraga Lainnya	67.045.000,00	-	-	-	-	67.045.000,00
Aset Tetap Renovasi	98.935.000,00	49.430.950,00	-	-	-	148.365.950,00
Jumlah	596.236.988,00	49.430.950,00	-	-	-	645.667.938,00

Penjelasan mutasi :

1. Buku

Nilai aset tetap berupa buku per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan Rp. 25.000.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

2. Barang-Barang Perpustakaan

Nilai aset tetap berupa barang-barang perpustakaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 228.136.000,00 dan Rp. 228.136.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

3. Barang Bercorak Kebudayaan

Nilai aset tetap berupa barang bercorak kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 177.120.988,00 dan Rp. 177.120.988,00, tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

4. Alat Olahraga Lainnya

Nilai aset tetap berupa alat olahraga lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 67.045.000,00 dan Rp. 67.045.000,00. Tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018.

5. Aset Tetap Renovasi

Nilai aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 148.365.950,00 dan Rp. 98.935.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 49.430.950,00.

3.2.1.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 500.484.771,00 dan Rp. 500.484.771,00, mengalami koreksi debit. Mutasi transaksi terhadap konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Konstruksi Dalam Pengerjaan						
Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.484.771,00	195.307.894,00	389.283.400,00	-	-	306.509.265,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	-	193.975.506,00	-	-	-	193.975.506,00
Jumlah	500.484.771,00	389.283.400,00	389.283.400,00	-	-	500.484.771,00

Penjelasan mutasi :

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Pada saldo tersebut Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp. 306.509.265,00 dan Rp. 500.484.771,00. Mengalami penambahan sebesar Rp. 195.307.894,00 dan pengurangan Rp. 398.283.400,00.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan

Konstruksi dalam pengerjaan jalan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 193.975.506,00, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada saldo tersebut. Pada Tahun 2019 terjadi penambahan sebesar Rp. 193.975.506,00

3.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp. 4.502.645.228,00) dan (Rp. 3.634.368.439,00) penambahan dibandingkan Tahun 2018. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mutasi transaksi terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.265.723.854,00)	-	(20.524.990,00)	(199.075.840,00)	-	(1.444.274.704,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.567.230.693,00)	913.150,00	(1,00)	(502.360.923,00)	-	(2.068.678.465,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(801.413.892,00)	(10,00)	-	(188.278.157,00)	-	(989.692.059,00)
Jumlah	(3.634.368.439,00)	(913.140,00)	(20.524.991,00)	(889.714.920,00)	-	(4.502.645.228,00)

Penjelasan mutasi :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penyusutan alat angkutan darat bermotor alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, dan alat komunikasi. Adapun Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp. 1.444.274.704,00) pengurangan sebesar (Rp. 20.524.990,00) dan mutasi debet (Rp. 199.075.840,00), sedangkan Tahun Anggaran sebesar (Rp. 1.265.723.854,00).

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar (Rp. 2.068.678.465,00) dan (Rp. 1.567.230.693,00). Terdapat koreksi debet (Rp. 913.150,00) dan kredit (Rp. 1,00), sedangkan mutasi debet (Rp. 502.360.923,00).

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu peringatan.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebesar (Rp. 989.692.059,00) dan (Rp. 801.413.892,00). Terdapat koreksi debet sebesar (Rp. 10,00) dan mutasi debet (Rp. 188.278.157,00).

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan, bangunan air irigasi, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, dan instalasi air minum/air bersih.

3.2.1.3. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 28.835.680,50 dan Rp. 14.230.176,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2018. Mutasi transaksi terhadap aset lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019 (Rp)
		D	K	D	K	
Aset Tak Berwujud	2.210.424,50	-	(0.50)	(442.085,00)	-	1.768.340,00
Aset Lain-lain	26.625.256,00	(14.163.420,00)	-	-	-	12.461.836,00
Jumlah	28.835.680,50	(14.163.420,00)	(0.50)	(442.085,00)	-	14.230.176,00

3.2.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 1.768.340,00 dan Rp. 2.210.424,50. Mengalami pengurangan dikoreksi kredit Rp. 0,50 dan mutasi debit sebesar Rp. 442.085,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapaun aset tak berwujud tersebut adalah *software* dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya.

3.2.1.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 12.461.836,00 dan Rp. 26.626.256,00. Mengalami pengurangan sebesar Rp. 14.163.420,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

3.2.2. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 11.207.448,00 dan Rp. 9.224.790,00, tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari Tahun 2018. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memiliki kewajiban jangka pendek berupa utang belanja sebesar Rp. 11.207.448,00 sedangkan kewajiban jangka Panjang tidak ada.

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 52.180.628.550,04 dan Rp. 40.389.923.635,50. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/deficit operasional.

3.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayar kembali Periode Tahun Anggaran 2019, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut :

URAIAN	2019	2018	+/-	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	6.307.017.800,00	4.982.976.800,00	1.324.041.000,00	26,26
Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	10.496.897,00	12.239.800,00	(1.832.903,00)	10.15
Jumlah	6.317.514.697,00	4.995.306.600,00	1.322.208.097,00	26,47

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 6.317.514.697,00 dan Rp. 4.995.306.600,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.322.208.097,00 atau sebesar 26,47 %.

Realisasi masing-masing pendapatan-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian jumlah PAD sebagai berikut :

URAIAN	2019	2018	+/-	%
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	6.307.017.800,00	4.982.976.800,00	1.324.041.000,00	26,57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	50.000.000,00	0	50.000.000,00	~
lain-lain PAD Yang Sah	10.496.897,00	12.329.800,00	-1.832.903,00	-14,87
Jumlah	6.367.514.697,00	4.995.306.600,00	1.372.208.097,00	26,47

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya bersumber dari pendapatan retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan retribusi Daerah berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga per 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu sebesar Rp. 6.307.017.800,00 dan Rp. 4.982.976.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.324.041.000,00 atau 26,57 % dari Tahun 2018. Pendapatan hibah dari Pemerintah Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2018 tidak menerima hibah tersebut. Pendapatan lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.496.897,00 sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12.329.800,00. Pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah sistem sewa.

3.3.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya, maupun bantuan keuangan baik Tahun 2019 dan 2018.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada pendapatan daerah yang sah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya baik Tahun 2019 dan 2018.

3.3.2. Beban

Beban sesuai PSAP 12 adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14.823.207.783,53 dan Rp. 9.615.878.832,90 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.207.329.950,63 atau sebesar 54,15 % dari Tahun 2018.

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Pegawai	4.272.234.810,00	4.064.787.469,00	207.447.341,00	5,10
Beban Persediaan	1.812.319.226,96	1.404.648.042,00	397.671.184,96	28,31
Beban Jasa	4.940.520.266,00	2.929.575.569,00	2.010.944.697,00	68,64
Beban Pemeliharaan	67.434.994,00	69.748.192,00	(2.313.198,00)	(3,32)
Beban Perjalanan Dinas	712.762.918,00	512.102.737,00	200.660.181,00	39,18
Beban Hibah	2.043.298.028,00	-	2.043.298.028,00	~
Beban Penyusutan dan Amortisasi	921.721.290,57	635.016.828,90	286.704.461,67	45,15
Beban Lain-lain	52.916.250,00	-	52.916.250,00	~
Jumlah	14.823.207.783,53	9.615.878.832,90	5.207.328.950,63	54,15

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 dan 2018 tidak memiliki Beban berupa beban bunga, beban subsidi, beban penyisihan piutang, beban bantuan sosial, beban lain-lain, dan beban transfer bagi hasil pajak Daerah.

3.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp. 4.272.234.810,00 dan Rp. 4.064.787.469,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 207.447.341,00 atau sebesar 5,10 % dari Tahun 2018.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pegawai	Jumlah (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan		2.400.055.635,00
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.862.066.300,00
2	Tunjangan Keluarga	203.400.166,00
3	Tunjangan Jabatan	157.020.000,00
4	Tunjangan Fungsional	-
5	Tunjangan Fungsional Umum	62.900.000,00
6	Tunjangan Beras	107.978.220,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.655.829,00
8	Pembulatan Gaji	35.120,00
9	Iuran Asuransi Kesehatan	-

10	Uang Paket	-
11	Uang Duka Wafat/Tewas	-
12	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian	-
13	Tunjangan Khusus Guru	-
14	Tunjangan Khusus PNS	-
Beban Tambahan Penghasilan PNS		1.455.510.175,00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	-
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	-
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	-
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	-
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	-
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.455.510.175,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah		0
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		162.080.000,00
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	162.080.000,00
2	Honorarium PNS	-
3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-
4	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	-
5	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	-
6	Honorarium Pengelola Inventaris Barang	-
7	Honorarium koordinator/ Operator	-
8	Honorarium Tim Angka Kredit	-
9	Honorarium PLT	-
10	Honorarium Petugas Piket	-
11	Honorarium Sidang Tim	-
12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	-
13	Honorarium Kepanitiaan	-
Honorarium Non PNS		237.810.000,00
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.100.000,00
2	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.260.000,00
3	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	83.200.000,00
4	Honorarium Pengelola Inventaris Barang	-
5	Honorarium koordinator/ Operator	-
6	Honorarium Tim Angka Kredit	-
7	Honorarium PLT	-
8	Honorarium Petugas Piket	-
9	Honorarium Sidang Tim	113.550.000,00
10	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.700.000,00
11	Honorarium Kepanitiaan	-
Uang Lembur		16.779.000,00
1	Uang Lembur PNS	16.779.000,00
2	Uang Lembur Non PNS	-
Jumlah Beban Pegawai		4.272.234.810,00

3.3.2.2. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 1.812.319.226,96 dan Rp. 1.404.648.042,00. Mengalami penurunan sebesar Rp. 407.671.184,96 atau 29,02 % dari Tahun 2018.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Persediaan	Jumlah (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		543.105.730,00
1	Beban Alat Tulis Kantor	149.018.875,00
2	Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.788.000,00
3	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.176.000,00
4	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.607.855,00
5	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	2.150.000,00
6	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
7	Beban Pengisian Tabung Gas	0,00
8	Beban Bahan dan Alat Olah Raga	0,00
9	Beban Bahan dan Alat Keperluan Kantor-LO	0,00
10	Beban Dekorasi, Dokumentasi, dan Publikasi (Iklan, Spanduk, dan Lain-lain)-LO	365.365.000,00
11	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
Beban Cetak dan Penggandaan		339.409.896,96
1	Beban Cetak	305.837.696,96
2	Beban Penggandaan	27.572.200,00
3	Beban Penjilidan	6.000.000,00
4	Beban Laminating	0,00
Beban Bahan/Material		270.795.600,00
1	Beban Bahan Baku Bangunan	100.043.600,00
2	Beban Bahan/Bibit Tanaman	0,00
3	Beban Bibit Ternak	0,00
4	Beban Bahan obat-obatan	0,00
5	Beban Bahan Kimia	0,00
6	Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00
7	Beban Bahan Praktek	2.000.000,00
8	Beban Bahan Pengumuman dan Sejenisnya	0,00
9	Beban Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel	0,00
10	Beban Bahan Sarana Belajar Mengajar	0,00

11	Beban Bahan Jaringan dan Instalasi	0,00
12	Beban Bahan dan Alat Rumah Tangga	0,00
13	Beban Bahan dan Alat Pertanian	0,00
14	Beban Pakan Ternak	0,00
15	Beban Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	17.400.000,00
16	Beban Bahan dan Alat Kesehatan	0,00
17	Beban bahan radiologi	0,00
18	Beban Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	151.352.000,00
Beban Makanan dan Minuman		573.308.000,00
1	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00
2	Beban Makanan dan Minuman Rapat	91.375.500,00
3	Beban Makanan dan Minuman Tamu	2.162.500,00
4	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00
5	Beban makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00
6	Beban Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Pasien	0,00
7	Beban Extra Fooding	0,00
8	Beban Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	478.570.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		0,00
1	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00
2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00
3	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00
4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00
6	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00
7	Beban Kelengkapan pakaian Dinas	0,00
8	Beban Pakaian Dinas Lapangan	0,00
Beban Pakaian Kerja		14.000.000,00
1	Beban Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00
2	Beban Pakaian Kerja Identitas	0,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		71.700.000,00
1	Beban Pakaian KORPRI	0,00
2	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00
3	Beban Pakaian Batik Tradisional	23.700.000,00
4	Beban Pakaian Olahraga	48.000.000,00
5	Beban Pakaian Paskibra	0,00
6	Beban Pakaian Seragam Organisasi	0,00
7	Beban Kelengkapan Pakaian (Rompi dll)	0,00
8	Beban Pakaian Seragam Tim	0,00
Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		0,00
1	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00
2	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00
3	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	0,00
Jumlah Beban Persediaan		1.812.319.226,96

3.3.2.3. Beban Jasa

Jumlah beban jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 4.940.520.266,00 dan Rp. 2.929.575.564,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.010.944.702,00 atau 69,00 % dari Tahun 2018. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Jasa	Jumlah (Rp)
Jasa Kantor		4.105.023.153,00
1	Beban Telepon	13.353.778,00
2	Beban Air	2.182.151,00
3	Beban Listrik	95.262.880,00
4	Beban Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00
5	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	(9.250,00)
6	Beban Paket/Pengiriman	-
7	Beban Sertifikasi	-
8	Beban Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	668.658.200,00
9	Beban Penerangan Jalam Umum (PJU)	-
10	Beban Air Time Radio Swasta	-
11	Beban Jasa Perawatan dan Pengobatan	-
12	Beban jasa General Chek Up	-
13	Beban Uang saku kegiatan/rapat	711.019.500,00
14	Beban Retribusi Kebersihan kota	-
15	Beban Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	98.150.000,00
16	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	-
17	Beban Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	639.056.000,00
18	Beban Jasa service dan Penggantian komponen	10.050.000,00
19	Beban Jasa Pengangkutan Barang	-
20	Beban Propaganda, Penerangan dan publikasi	-
21	Beban Perawatan alat Kesehatan dan Laboratorium	-
22	Beban Jasa Pelayanan umum	225.050.000,00
23	Beban Jasa Pelayanan Medis	-
24	Beban Jasa Biro Perjalanan	-
25	Beban Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	-
26	Beban Iuran kepesertaan	-
27	Beban stimulan pembangunan	-
28	Beban Jasa Pihak Ketiga	1.462.072.394,00
29	Beban Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan	-

30	Beban Jasa administrasi Perijinan Penyiaran	-
31	Beban Jasa administrasi Perijinan	-
32	Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan	-
33	Beban jasa hiburan/kesenian	176.697.500,00
34	Beban jasa pengelolaan LPPL	-
35	Beban Pajak ABT	-
36	Beban Jasa Transaksi Keuangan	-
37	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	-
38	Beban Jasa Pinjaman UMKM	-
Beban Premi Asuransi		-
1	Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	-
2	Beban Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	-
3	Beban Premi Asuransi Kesehatan dan general check up	-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		136.499.863,00
1	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	79.200.000,00
2	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00
3	Beban Sewa Penginapan & Akomodasi	45.049.863,00
4	Beban Sewa Tanah	-
5	Beban Sewa panggung/Stan	11.000.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas		67.100.000,00
1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.100.000,00
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		229.467.000,00
1	Beban Sewa Meja Kursi	19.967.000,00
2	Beban Sewa Komputer dan Printer	-
3	Beban Sewa Proyektor	-
4	Beban Sewa Generator	-
5	Beban Sewa Tenda	24.250.000,00
6	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	39.000.000,00
7	Beban Sewa Alat Elektronik	134.750.000,00
8	Beban Sewa Alat Rumah tangga	-
9	Beban Sewa Alat-alat Tradisional	11.500.000,00
10	Beban Sewa alat-alat Sarana perlengkapan olahraga	-
11	Beban Sewa Peralatan Praktek	-
Jasa Konsultasi		59.430.250,00
1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	-
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	59.430.250,00
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-
1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-
2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-
3	Beban Barang/Jasa Yg Akan Diserahkan Kpd Masy/Pihak Ketiga	-
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		343.000.000,00
1	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	77.000.000,00
2	Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	266.000.000,00
Jumlah Beban Jasa		4.890.520.266,00

3.3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 67.434.994,00 dan Rp. 69.748.192,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.313.198,00 atau sebesar 3,32 % dari Tahun 2018.

Beban Pemeliharaan adalah merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Jumlah (Rp)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		67.434.994,00
1	Beban Jasa Service	10.000.000,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.686.494,00
4	Beban Jasa KIR	-
5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.748.500,00
6	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-
Beban Pemeliharaan		-
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
Jumlah Beban Pemeliharaan		67.434.994,00

3.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 712.762.918,00 dan Rp. 512.102.737,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.660.181,00 atau sebesar 39,18 % dari Tahun 2018.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Perjalanan Dinas	Jumlah (Rp)
Beban Perjalanan Dinas		712.762.918,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.270.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	663.492.918,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Beban Perjalanan Pindah Tugas		-
1	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	-
2	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		712.762.918,00

3.3.2.6. Beban Hibah

Beban hibah pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 2.043.298.028,00 dan Rp. 954.935.000,00. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Hibah	Jumlah (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya		-
1	Hibah kepada Pemerintah Provinsi	-
2	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	-
3	Hibah kepada Pemerintah Kota	-
Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa		-
1	Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa	-
Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		-
1	Perusahaan Daerah/BUMD	-
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		-
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan-LO	-
2	KONI	-
3	Kwarcab Pramuka	-
4	PMI	-
5	Korpri	-
6	Dharma Wanita	-
7	LVRI	-
8	Komisi Pemilihan Umum-LO	-
9	Bawaslu-LO	-
Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		-
1	Pengurus Sarana Peribadatan/Kegiatan Keagamaan	-
2	Cost Sharing Program Pemberdayaan Masyarakat	-
3	Kelompok Kesenian/Kebudayaan	-
4	Pendamping PLPBK	-
5	Kelompok Masyarakat Pengelola Air Bersih	-
Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		2.043.298.028,00
1	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.799.564.450,00
2	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-
3	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	243.733.578,00
Jumlah Beban Hibah		2.043.298.028,00

3.3.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 921.721.290,57 dan Rp. 635.016.828,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 286.704.462,57 atau sebesar 46,00 % dari Tahun 2018.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah (Rp)
1	Beban penyusutan peralatan dan mesin	199.075.840,00
2	Beban penyusutan gedung dan bangunan	501.335.441,00
3	Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	188.278.157,00
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	33.011.852,57
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		921.721.290,57

3.3.2.8. Beban Lain-lain

Beban lain-lain pada Tahun 2019 sebesar Rp. 52.916.250,00 dan Tahun 2018 tidak ada beban hibah. Beban lain-lain tersebut berupa beban penyisihan piutang retribusi. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Lain-lain	Jumlah (Rp)
Beban Penyisihan Piutang		52.916.250,00
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	-
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	52.916.250,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-
Beban Penyisihan Dana Bergulir		-
1	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-
Lain-lain Beban		-
1	Lain-lain Beban	-
Jumlah Beban Lain-lain		52.916.250,00

3.3.3. Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak terdapat defisit non operasional sedangkan pada Tahun 2018 terdapat surplus/defisit non operasional yang berasal dari penjualan aset non lancar sebesar Rp. 263.837.013,00.

3.3.4. Pos Luar Biasa

Pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak terdapat pendapatan maupun beban luar biasa.

3.3.5. Surplus/Defisit LO

Realisasi surplus/defisit-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp. 8.424.128.800,96). Apabila dibandingkan dengan realisasi surplus/defisit-LO Tahun 2018 sebesar (Rp. 5.839.344.245,90), maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.170.829.665,06 atau 39,46 %.

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama Tahun Anggaran 2019. Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 52.180.628.550,04 berasal dari saldo awal ekuitas per Desember 2018 sebesar Rp. 40.389.923.635,50 ditambah surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp. 8.455.693.086,53) ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 101.848.959,50 dan kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 20.111.979.274,00.

3.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 40.389.923.635,50 berasal dari saldo ekuitas neraca per 31 Desember 2018 setelah audit.

3.4.2. Surplus Defisit LO Tahun Anggaran 2019

Surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp. Rp. 8.455.693.086,53) berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional.

3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan atas ekuitas awal sebesar Rp. 101.848.959,50 yang terdiri dari koreksi nilai persediaan sebesar

Rp. 121.605.330,00, selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0,00 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 19.756.370,50. Adapun koreksi lainnya berupa :

1. Koreksi lebih catat nilai akhir penyesuaian sebesar Rp 1,50;
2. Koreksi lebih catat piutang sebesar (Rp. 5.000.000,00); dan
3. Koreksi kurang catat nilai akun penyusutan sebesar (Rp. 14.756.372,00).

3.4.4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Dalam hal pencatatan kewajiban selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan (perkembangan) yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Kewajiban untuk dikonsolidasikan dari laporan perubahan ekuitas adalah sebesar Rp. 20.111.979.274,00.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam Tahun Anggaran 2019 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019.

Wonosobo, 26 Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Wonosobo
Kepala Satpol. PP. Kab. Wonosobo



Haryono S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001

LAMPIRAN